



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

MENAKAR INTEGRASI KEBANGSAAN

Muhammad Syukur

Dosen Pendidikan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Makassar

Email: syukurmuhammad10@gmail.com

ABSTRACT

The diversity of Indonesian society seen from ethnicity, socioeconomic status, ecology, profession, religion, and education. A multifaceted could be an element of the integrating nationality at a time can be a threat of disintegration. There are three forms of integration nationalities often practiced by people in the life of the nation, namely the integration of normative, functional, and integration coercive. The third form of the national integration should be carried out proportionally. While the national consciousness typologi divided 4 groups: group rational, idealistic, traditional, and emotional group.

ABSTRAK

Potret kebhinekaan Indonesia terlihat dari keberagaman suku bangsa, status sosial ekonomi, ekologi, profesi, agama, dan lain-lain. Keaneragaman tersebut bisa menjadi unsur perekat integrasi kebangsaan sekaligus bisa menjadi ancaman desintegrasi. Terdapat tiga bentuk integrasi kebangsaan yang sering dipraktekkan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu integrasi normatif, fungsional, dan integrasi koersif. Ketiga bentuk integrasi kebangsaan tersebut perlu dilaksanakan secara proporsional. Sedangkan typologi kesadaran berbangsa terbagai 4 golongan yaitu golongan rasional, idealis, tradisional, dan golongan emosional.

Kata kunci: *Integritas Kebangsaan, dan Typologi Kesadaran Berbangsa*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan luas sekitar 1.919.440 km² dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 17.504. Secara geografis wilayah Indonesia letaknya di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Benua Asia dengan Benua Australia. Sedangkan samudra yang membatasi adalah Samudra Hindia dan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Samudra Pasifik. Letak geografis ini sangat memiliki pengaruh pada keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial maupun ekonomi dan politik. Kondisi letak suatu wilayah biasanya berhubungan dengan unsur lokasi, posisi, batas, bentuk, dan luas.

Menurut sensus BPS tahun 2010, terdapat 633 kelompok etnik besar atau sekitar 1.340 sub-etnik bangsa dan terdapat 11 etnis yang memiliki warga di atas 1 persen dari total penduduk Indonesia. Komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok etnis dimana etnik Jawa sebesar 40,05%, Sunda 15,50%, Melayu, Madura, Bali, Batak, Minangkabau, Bugis, Betawi, dan Sasak, masing-masing dibawah 5%. Sedangkan kelompok etnik lainnya dibawah 1%. (<https://www.bps.go.id>). Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan etnisitas di Indonesia sangat beragam. Tentunya setiap etnis tersebut memiliki identitas dan karakteristik tersendiri. Jika kondisi keberagaman etnisitas ini tidak terkelola dengan baik, maka ancaman disintegrasi bangsa sewaktu-waktu dapat muncul.

Seiring dengan bergulirnya reformasi dan otonomi daerah, maka nampak sentimen etnisitas mengalami penguatan. Gejala itu terlihat dari adanya kesadaran kelompok etnik tertentu untuk memainkan masalah etnisitas dalam meraih kekuasaan. Sentimen etnis dimainkan dalam mendukung suara dalam berbagai pemilihan kepala daerah, gubernur (eksekutif) dan pemilihan anggota dewan (legislatif).

Keragaman penduduk Indonesia juga nampak dari sisi agama. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh Negara. Adapun agama yang diakui keberadaannya di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik etnisitas dan agama yang pernah terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Konflik Berdasarkan Sentimen Etnis dan Agama di Indonesia

Provinsi	Jumlah Meninggal	%	Jumlah Insiden	%
Anti Cina				
Jakarta	1.188	94,4	1	3,1
Jawa Tengah	35	2,8	12	37,5
Riau	23	1,8	3	9,4
Jawa Barat	6	0,5	9	28,1
Sulawesi Selatan	5	0,4	1	3,1
Nusa Tenggara Barat	2	0,2	2	6,3
Jawa Timur			4	12,5
Total	1.259	100	32	100
Daya/Melaya Vs Madura				
Kalimantan Barat	1.502	54,3	47	67,1
Kalimantan Tengah	1.260	45,6	22	31,4
Jawa Timur	2	0,1	1	1,4
Total	2.764	100	79	100
Islam Versus Kristen				
Maluku Utara	2.756	50,6	67	15,5
Maluku	2.023	37,1	307	70,9
Sulawesi Tengah	654	12	31	7,1



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Jakarta	6	0,1	1	0,2
Jawa Timur	5	0,1	6	1,4
Nusa Tenggara Barat	5	0,1	4	0,9
Sulawesi Selatan dan Barat	3	0,1	7	1,6
Jawa Barat			6	
Nusa Tenggara Timur			4	0,9
Total	5.452	100	433	100

Sumber: Yasmin (Wirutomo *et.all*, 2012: 114).

Furnivall mengemukakan bahwa ciri masyarakat majemuk di jaman Hindia-belanda ditandai oleh berbagai kelompok etnik yanghidup bersama dalam suatu kawasan, namun tidak saling membaur satu samalain dan masing-masingmemiliki pranata sosial sendiri (kekerabatan, agama, pendidikan, ekonomi dan lain-lain). Secara formal, masyarakat majemuk terpisah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak memiliki cita-cita yang sama. Adapun 3 kelompok sosial yang dimaksud Furnivall yaitu:

1. Bangsa Belanda dan orang kulit putih lainnya sebagai lapisan atasdan umumnya adalah pelaku bisnis besar
2. Ras timur Asing (India, Arab, dan Cina) menempati lapisan kedua dan umumnya sebagai pedagang
3. Golongan pribumi atau inlander berada di lapisan bawah dan sebagai buruh dan petani.

Kalau kita petakan masyarakat Indonesia berdasarkan stratifikasi, maka menarik jika kita menggunakan perspektif dari **Zenden (Satria, 2002)**yang memetakan 3 pendekatan dalam menentukan stratifikasi sosial yaitu:

1. Pendekatan Obyektif, yaitu menggunakan ukuran obyektif berupa variabel yg mudah diukur secara statistik seperti: pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan.
2. Pedekatan Subyektif, dimana kelas sebagai kategori sosial dan disusun dengan meminta para responden survey untuk menilai status sosial sendiri dengan jalan menempatkan diri pada kelas tertentu.
3. Pendekatan Reputasional, dimana subyek penelitian diminta untuk menilai status orang lain dengan menempatkan orang lain pada skala tertentu.

Integrasi Kebangsaan

1. Normatif

Integrasi normatif adalah integrasi yang terjasi karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama atau adanya rasa solodaritas (Wirutomo, 2012). Integrasi normatif pada dasarnya sejajar dengan konsep solidaritas solidaritas mekanik dari Emile Durkheim. Solidaritas mekanik ditandai oleh adanya perasaan yang sama tentang nilai-nilai dasar yang tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarkat, soldaritas mekanik akan bergeser secara evolutif menuju ke solidaritas organik dan nilai tentang kesepakatan nilaiupun secara perlahan akan bergeser menjadi saling ketergantungan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

fungsional antar anggota masyarakat. Tetapi, pada derajat tertentu masih kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar tertentu.

Konsep integrasi normatif merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana masyarakat masih memiliki ikatan yang bersifat solidaritas mekanis. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan untuk menakar tingkat integrasi normatif masyarakat Indonesia seperti;

- 1) Apakah masih ada nilai-nilai dasar yang disepakati bersama? Apakah nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, ketongroyongan, kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pancasila masih mewarnai kehidupan bangsa Indonesia?.
- 2) Apakah masih terdapat norma-norma dasar bersama? Sejauhmana norma-norma dasar itu menjadi patokan daripada norma-norma spesifik? Apakah Undang-Undang Dasar 1945 masih norma dasar bersama dan menjadi rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dibawahnya?.
- 3) Adakah indentitas bersama? Adakah kita mengakui kebinnekaan sebagai indentitas bangsa Indonesia.
- 4) Adakah solidaritas antar daerah dan golongan.
- 5) Adakah cita-cita bersama? Masihkah kita memiliki cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur?

Kuat dan lemahnya solidaritas normatif yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, sangat tergantung pada jawaban-jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan diatas.

2. Fungsional

Integrasi fungsional dilandaskan pada perspektif fungsional yang melihat bangsa Indonesia sebagai suatu sistem yang terintegrasi antar unsur-unsurnya. Indonesia sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang dipersatukan oleh adanya kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi melalui interaksi diantara unsur-unsur yang ada (ketergantungan fungsional).Ketergantungan fungsional dilandasi oleh adanya perbedaan fungsi dari setiap unsur-unsur yang ada.Negara membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan Negara.Pusat membutuhkan daerah-daerah, dan daerah-daerah membutuhkan pusat adalah merupakan suatu contoh integrasi yang dilandasi oleh ketergantungan fungsional.

Pertanyaan kritis yang muncul yaitu adakah Negara membutuhkan masyarakat/rakyat, dan apakah rakyat masih membutuhkan Negara.Adakah Negara masih menjalankan fungsinya dan adakah masyarakat/rakyat masih berjalan fungsinya.Jika Negara masih menjalankan fungsinya dimana fungsi itu tidak dimiliki oleh masyarakat, dan masyarakatpun masih berjalan fungsinya yang tidak dimiliki oleh Negara, maka pada posisi itu integrasi fungsional masih sangat kuat. Negara harus menghadirkan rasa aman kepada masyarakat karena hal itu menjadi fungsi Negara, disisi lain masyarakat/rakyat memiliki fungsi untuk membayar pajak kepada Negara. Perbedaan fungsi dan adanya ketergantungan terhadap



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

fungsi sehingga bisa memunculkan saling ketergantungan membuat integrasi bisa menjadi kuat.

3. Koersif

Integrasi koersif merupakan integrasi yang dicapai melalui hasil kekuatan yang sanggup mengikat individu dan masyarakat secara paksa. Integrasi secara paksa dapat tercapai manakala pihak memiliki kekuasaan lebih besar dengan menggunakan pranata social (*social institution*). Negara melalui peraturan perundangan-undangan, apatur Negara, lembaga peradilan, kepolisian, tentara dan lain-lain memiliki kuasa untuk memaksa masyarakat untuk taat.

Pemikiran tentang integrasi koersif ini dilandasi oleh teori paksaan (*coercion of society*). Teori ini melihat bahwa struktur sosial sebagai suatu bentuk organisasi yang diikat oleh kekuatan serta peraturan yang memaksa. Dahrendorf mengemukakan bahwa semua unit social (Negara, komunitas, kota, organisasi, bahkan juga keluarga) selalu diintegrasikan melalui kekuatan yang menguasai dan memaksa (Morrison, 1995; Ritzer, and Goodman, 2007; Turner, 2009). Dahrendorf menyebut hal itu sebagai *imperatively coordinated association (ICA)*. Pemilik kuasa dalam integrasi normatif bisa berasal kekuasaan legal formal (*authority*) yaitu yang dimiliki Negara (pemerintah) tetapi bisa juga berasal dari kekuasaan tidak formal (*naked power*). Misalnya kelompok yang memiliki sumberdaya seperti kekuatan ekonomi, senjata, teknologi dan sebagainya.

Integrasi koersif tidak selamanya bernuansa otoriter, tetapi bisa juga bernuansa demokratis. Artinya kekuasaan didapatkan melalui proses demokrasi, termasuk adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, tetapi setelah berkuasa, maka diberi wewenang untuk memaksa. Pemaksaan dalam konteks ini bersifat *legimate* (mendapat pembenaran dari masyarakat) dan *legal* (disahkan oleh hukum). Namun demikian, bisa juga tidak resmi (*naked power*), misalnya pengusaha yang berkolusi dengan pemerintah atau partai politik untuk melakukan suatu keputusan politik yang mampu memaksa masyarakat.

Ketiga bentuk integrasi kebangsaan (normatif, fungsional, dan koersif) merupakan suatu kerangka yang akan menyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia ketiga bentuk integrasi kebangsaan itu biasanya selalu ada meskipun dalam derajat dan waktu yang berbeda. Ketiganya perlu dihadirkan secara proporsional dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, integrasi normatif bila terlalu kuat akan menjurus kepada *chauvinisme* (cinta kepada bangsa yang berlebihan), tetapi bila terlalu lemah maka yang terjadi adalah *cultural animosity* (kebencian tersembunyi antar kelompok). *Kedua*, jika integrasi fungsional terlalu lemah, maka akan muncul sikap apatisme atau kesenjangan (*inequality*), tetapi bila semua warga Negara terlalu kuat mementingkan keuntungan negaranya, maka bisa terjadi sikap *utilitarianisme*, yaitu sikap yang mementingkan keuntungan diri sendiri, bukan masyarakat yang lebih luas, dan bila Negara tidak memberikan fungsi, maka mereka akan meninggalkannya. *Ketiga*, jika integrasi koersif terlalu kuat akan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

menyebabkan dominasi pemerintah secara berlebihan dan dapat menjurus kepada fasisme atau totalitarianism, sebaliknya jika peran Negara terlalu lemah, maka bisa menimbulkan Negara kehilangan wibawa dan dapat mengundang anarki (Wirutomo, 2012).

Typologi Kesadaran Berbangsa

1. **Golongan Rasionalis;** menyandarkan rasa kebangsaan pada kalkulasi untung dan rugi. Golongan lebih mengajar tercapainya integrasi fungsional. Mereka memiliki kualitas SDM yg tinggi (kaum intelektual atau bermodal) tetapi sikap mereka sangat *utilitarian* bahkan cenderung oportunistis (hanya cari selamat). Jumlah golongan ini sedikit, tapi kedepan semakin banyak.
2. **Golongan Idealis;** orang yang mendasarkan kewarganegaraannya pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi, seperti nasionalisme, kesatuan, kerukunan, patriotisme dll. Jumlah masih banyak terutama golongan tua yang merasakan masa perjuangan kemerdekaan.
3. **Golongan Tradisionalis;** orang-orang yang menganggap bahwa integrasi kita sebagai bangsa sebagai negara adalah sesuatu yang otomatis. Tidak dipersoalkan dan dipertanyakan. Golongan terdiri golongan rakyat yang mayoritas berpendidikan rendah. Mungkin golongan ini tdk memiliki rasa patriotik tapi masih berada dalam kesadaran komunal.
4. **Golongan Emosional;** kelompok ini jumlah dan identitas mereka sangat cair. Ketika PSSI menang melawan Malaysia, maka 240 juta jiwa penduduk Indonesia tiba-tiba membara rasa nasionalisma kebangsaan, tapi giliran PSSI kalah, maka sikap berubah nasionalisme hilang dan berganti menjadi kemarahan dan sinisme.

Alangkah indah nya jika bangsa Indonesia senantiasa menghadirkan euforia nasionalisme sebagai pemantik kehidupan berbangsa. Berbagai bentuk pemantik yang dapat menghadirkan euphoria nasionalisme seperti prestasi anak bangsa baik dibidang seni, olahraga, ilmu pengetahuan dan takhnologi. Masyarakat sebagai bangsa akan bangga sebagai bangsa Indonesia manakala terdapat anak bangsa yang jadi juara dalam event olah raga di tingkat internasional, juara dalam olimpiade sains. Euforia nasionalisme juga bisa dibangkitkan melalui upacara kemerdekaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Euforia nasionalisme juga dibangkitkan manakala rakyat merasakan hadirnya Negara dalam memberikan keamanan dalam masyarakat, keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi, serta semua masyarakat dapat mengakses pendidikan dan kesehatan.

Jadi cukup jelas sekali bahwa kajian mengenai bagaimana hubungan rakyat/masyarakat dan Negara, adalah salah satu tujuan paling mendasar dan sangat menarik dalam kehidupan manusia, untuk itu Ilmu Sosial menjadi hal yang



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

sangat dibutuhkan (Jones, 2010: 1). Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri tertentu, dan dengan ciri-ciri yang khas tersebut maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Namun demikian, proses pembentukan identitas nasional bukan merupakan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terbuka dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain, identitas nasional adalah sesuatu yang selalu berubah dan terbuka untuk diberi makna baru agar tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Identitas nasional Indonesia yang berbasis pada masyarakat multikultur sangat relevan bagi penegasan kembali identitas nasional bangsa Indonesia yang inklusif dan toleran dengan tetap mengakar pada identitasnya yang majemuk sebagaimana terefleksi dalam konsep dasar negara Pancasila. Konsep masyarakat multikultural dapat menjadi wadah pengembangan demokrasi dan Masyarakat Madani serta bisa menjadi modal sosial (social capital) bagi pengembangan model masyarakat multikultural Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Salah satu isu penting yang menggiring gelombang demokratisasi adalah munculnya wacana multikulturisme. Multikulturisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Akan tetapi perbedaan itu merupakan suatu anugerah betapa kayanya Indonesia sehingga dapat dikembangkan dan dihiasi oleh daerah-daerah sebagai bentuk integritas Indonesia.

PENUTUP

Suatu integrasi sosial yang bertanggungjawab dapat berkembang apabila sebagaimana besar anggota masyarakat bangsa bersepakat tentang batas-batas teritorial dari Negara sebagai suatu kehidupan politik, ekonomi, keamanan dan pendidikan. Selanjutnya setiap anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dalam proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Selama semua elemen masyarakat belum bersepakat mengenai hal tersebut, maka selama itu pula ancaman disintegrasi senantiasa menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, P. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Johnson, Doyle Paul. 1989. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid II. Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- Morrison, Ken. 1995. *Marx, Durkheim, Weber Formations of Modern Social Thought*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication Ltd.
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George and Goodman, Douglas J. 2007. *Modern Sociological Theory*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Edisi Keenam. Jakarta: Kencana.
- Turner, S. Bryan. 2009. *Social Theory*. Sixth Edition. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd.
- Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: PT Pustaka. Cidesindo